

PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN POS UKK DI FOOD ESTATE HUMBANG HASUNDUTAN

Ir. Kalsum, M.Kes¹, Drs. Eddy Syahrial, MS²

¹ Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas
Nomor 21, Kampus USU Padang Bulan, Medan, Indonesia

² Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas
Nomor 21, Kampus USU Padang Bulan, Medan, Indonesia *E-
mail: kalsumagustin@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan industrialisasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat baik di sektor formal maupun sektor informal. Sebesar 43,5% dari angkatan kerja atau sekitar 59,5 juta jiwa bekerja di sektor informal dan sebesar 56,5% atau sekitar 77,5 juta jiwa bekerja di sektor formal. Besarnya jumlah pekerja pada sektor informal memberikan dampak positif bagi kekuatan ekonomi nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Keberhasilan usaha di sektor informal juga didukung oleh kesehatan kerja yang berupaya mengatasi masalah kesehatan akibat dari pekerjaan. Pengabdian masyarakat bertujuan untuk melakukan pendampingan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Pos UKK yang mandiri dan berkesinambungan di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan agenda Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Secara umum, kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan adalah terbentuknya Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan yang terdiri dari tiga Pos UKK, terbentuknya kader kesehatan kerja, dan tersedianya Kotak P3K yang berisi obat-obatan dasar dan alat-alat kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat petani.

Kata Kunci: *Pembentukan, Petani, Pos UKK*

1. Pendahuluan

Perkembangan industrialisasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat baik di sektor formal maupun sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, diketahui terdapat 137 juta angkatan kerja yang tersebar di berbagai lapangan pekerjaan di Indonesia. Sebesar 43,5% dari angkatan kerja atau sekitar 59,5 juta jiwa bekerja di sektor informal dan sebesar 56,5% atau sekitar 77,5 juta jiwa bekerja di sektor formal.

Besarnya jumlah pekerja pada sektor informal memberikan dampak positif bagi kekuatan ekonomi nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Keberhasilan usaha di sektor informal juga didukung oleh kesehatan kerja yang berupaya mengatasi masalah kesehatan akibat dari pekerjaan, sehingga meningkat kesejahteraan dan produktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 yang menyatakan

bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas kerja.

Pekerja sektor informal dalam melakukan aktivitasnya mempunyai potensi risiko yang cukup kompleks, seperti masalah kesehatan yang timbul akibat proses kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang tidak sehat serta cara kerja yang tidak aman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kecelakaan pada pekerja.

Informasi kesehatan dan perkembangan kesehatan kerja sektor informal relatif kurang mendapat perhatian, sehingga perlu diantisipasi dan diberikan solusi bagi berbagai hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sektor informal di daerah, dengan tujuan dapat meningkatnya akses pemerataan dan kualitas upaya kesehatan kerja informal dalam mewujudkan pekerja yang sehat, mandiri dan berkeadilan.

Dengan demikian perlu adanya gebrakan untuk melakukan pendampingan dalam membentuk dan mengaktifkan Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang difokuskan pada pekerja sektor informal.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan strategi pengembangan kesehatan kerja sektor informal di Indonesia yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pendampingan difokuskan pada pendekatan pengembangan masyarakat (community development) untuk melibatkan pekerja sektor informal dalam menentukan bentuk dan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan tujuan memajukan kesehatan pekerja. Pengembangan masyarakat yang memberdayakan individu dan kelompok pekerja dapat mengarah pada komitmen yang lebih besar, memperkuat nilai-nilai kelompok/komunitas, kesediaan berbagi sumber daya dan memperbaiki ketidaksetaraan dalam kesehatan.

Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga diketahui hingga tahun 2020 terdapat Pos UKK dengan jumlah sebanyak 8553 yang tersebar di 34 provinsi dan 434 kabupaten/kota. Dari data tersebut diketahui sebanyak 80 kabupaten/kota masih belum memiliki Pos UKK. Dari 80 kabupaten/kota, terdapat 22 kabupaten/kota yang belum memiliki Pos UKK yang merupakan hasil irisan dengan 336 kabupaten/kota provinsi prioritas Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2021 serta 120 kabupaten/kota lokus AKI AKB serta 260 kabupaten/kota lokus stunting. 22 Kabupaten/kota ini menjadi fokus utama percepatan upaya kesehatan pekerja informal yang mendukung penurunan AKI/AKB dan stunting sehingga perlu dilakukan pendampingan bagi puskesmas dan kelompok sasaran pekerja informal di wilayahnya.

Pengabdian masyarakat bertujuan untuk melakukan pendampingan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Pos UKK yang mandiri dan berkesinambungan di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan.

2. Metodologi

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan agenda Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Tim Pengabdian Masyarakat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan tentang pembentukan Pos

UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan. Kemudian Tim Pengabdian meminta persetujuan Kepala Desa Ria-Ria tentang adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Setelah disetujui, Tim Pengabdian melakukan pertemuan dengan masyarakat petani untuk berdiskusi tentang Pos UKK. Tim Pengabdian memberikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi Pos UKK yang terbentuk.

Pos UKK yang terbentuk akan di pimpin oleh kader kesehatan kerja. Adapun persyaratan untuk menjadi kader kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Dipilih dari dan oleh masyarakat pekerja setempat.
- 2) Dapat membaca dan menulis huruf latin.
- 3) Tinggal di lingkungan tempat kerja tersebut.
- 4) Mau dan mampu bekerja untuk masyarakat pekerja di lingkungannya secara sukarela.
- 5) Mempunyai waktu untuk bekerja bagi masyarakat pekerja.

3. Hasil dan Pembahasan

Tim Pengabdian Masyarakat bertemu dengan Kepala Desa Ria-Ria yaitu Bapak Jon Perdianus Lumban Gaol dalam pembentukan Pos UKK sekaligus diskusi mengenai kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ria-Ria.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Senin, 08 November 2021 di Aula Desa Ria-Ria dengan agenda Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Peserta dihadiri oleh 30 masyarakat petani yaitu perwakilan dari Tujuh Kelompok Tani yang ada di Food Estate Desa Ria-Ria bersama dengan perangkat desa. Pada gambar 1 dapat dilihat masyarakat petani yang hadir dalam kegiatan MMD.



No	Ketua	Nama Pos UKK	Pos	Alamat
----	-------	--------------	-----	--------

1	Oberlin Siregar	KELOMPOK DOSROHA	Ria-Ria
2	Mangadar Siregar	KELOMPOK SEPAKAT	Buhit
3	Haposan Siregar	KELOMPOK SATAHI	Dusun III Ria Ria

Gambar 1. Kegiatan MMD

Selama berlangsungnya kegiatan, partisipasi dari masyarakat petani begitu antusias. Dari Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), terbentuk 3 Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria. Satu Pos UKK terdiri dari Ketua dan memiliki anggota sebanyak 10 orang.

Tahapan kegiatan selanjutnya, Tim Pengabdian meminta masyarakat petani untuk merundingkan siapa yang akan menjadi ketua dalam kelompoknya. Ketua yang terpilih diangkat menjadi kader kesehatan kerja bagi anggotanya.

Pada gambar 2 bisa dilihat ketua kelompok Pos UKK membuat perjanjian diatas materai sebagai bukti bersedia menjadi kader kesehatan kerja.



Gambar 2. Kegiatan pembentukan Pos UKK dan kader kesehatan kerja

Hasil kegiatan pendampingan pembentukan Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

- 1) Terbentuknya 3 Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan. Pada tabel 1 dapat dilihat ketua dan nama Pos UKK yang terbentuk.

Tabel 1. Daftar Nama Pos UKK

- 2) Terbentuknya kader kesehatan kerja.
- 3) Tersedianya Kotak P3K sebagai alat-alat kesehatan serta obat-obatan yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
- 4) UPT Puskesmas Hutapaung menjadi fasilitator dalam pembinaan Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan rencana dan luaran yang memenuhi target. Masyarakat petani di Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan mengikuti semua program dengan antusias. Secara umum, kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan adalah : 1) Terbentuknya Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan yang terdiri dari tiga Pos UKK yaitu, Kelompok Dosroha, Kelompok Sepakat, dan Kelompok Satahi.

- 2) Terbentuknya kader kesehatan kerja.
- 3) Tersedianya Kotak P3K yang berisi obat-obatan dasar dan alat-alat kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat petani. Untuk rencana selanjutnya diharapkan UPT Puskesmas Hutapaung sebaiknya melakukan pembinaan Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan secara konsisten. Bagi Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan sebaiknya melakukan upaya perolehan dana guna keberlanjutan program-program Pos UKK. Bagi Tim Pengabdian, sebaiknya tetap melaksanakan pendampingan dan pengembangan Pos UKK di Food Estate Desa Ria-Ria Humbang Hasundutan supaya program tetap berkesinambungan.

5. Referensi

<http://kesjaor.kemkes.go.id/>

<https://www.bps.go.id/>

Rosanti, E., & Andarini, Y. D. (2017). Program pendampingan pembentukan pos upaya kesehatan kerja (UKK) pada petani di desa Demangan Ponorogo. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 104110.

Undang Undang : Nomor 13 (2003) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja